

## STRATEGI *TRIPLE HELIX* DALAM INOVASI EKOSISTEM SERTIFIKASI HALAL UMKM DI KOTA TANGERANG

Hilman<sup>1</sup>, Afidah Nur Aslamah<sup>2</sup>  
Universitas Negeri Jakarta<sup>1, 2</sup>  
hilman@unj.ac.id<sup>1</sup>, afidah.nur@unj.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap kinerja dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang dengan menitikberatkan pada kolaborasi *Triple Helix* antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM serta pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan pertumbuhan penjualan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta penerapan praktik usaha berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi proses sertifikasi melalui biaya sertifikasi, pembinaan atau pendampingan, dan kerja sama dengan BPJPH serta LPPOM MUI Banten. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa keterbatasan kuota, rendahnya literasi halal, serta kerumitan administrasi. Melalui kerangka *Triple Helix*, kolaborasi antar pemangku kepentingan terbukti relevan dalam membangun ekosistem halal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan agar sertifikasi halal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, UMKM, Strategi *Triple Helix*, Kota Tangerang

### ABSTRACT

*This study analyzes the impact of halal certification on the performance and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tangerang City, with a focus on the Triple Helix collaboration among government, academia, and business actors. The research employed a qualitative approach through in-depth interviews with MSME owners and representatives from the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises of Tangerang City. The findings indicate that halal certification not only enhances consumer trust and sales growth but also stimulates job creation and the adoption of sustainable business practices. The government plays an essential role in facilitating the certification process through covering certification costs, providing training and technical assistance, and collaborating with BPJPH and LPPOM MUI Banten. However, the study also reveals challenges such as limited quotas, low levels of halal literacy, and administrative complexity. Within the Triple Helix framework, collaboration among stakeholders proves relevant in building an inclusive, innovative, and sustainable halal ecosystem, aligned with SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 12 (Responsible Consumption and Production). This study highlights the importance of continuous synergy to ensure that halal certification makes an optimal contribution to sustainable local economic development.*

**Keywords:** Halal Certification, MSMEs, Triple Helix Strategy, Tangerang City

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam agenda global, terutama sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8 tentang *Decent Work and Economic Growth* serta SDG 12 tentang *Responsible Consumption and Production*. Pemerintah Kota Tangerang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, ramah lingkungan dan

berdampak positif bagi masyarakat, termasuk prinsip halal.<sup>1</sup>

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam menjamin kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk UMKM. Dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global, sertifikasi halal telah menjadi instrumen strategis dalam mengembangkan pasar halal yang berkelanjutan<sup>2</sup>. Hal ini relevan dengan visi Kota Tangerang untuk menjadi kota yang kolaboratif, maju, berkelanjutan, sejahtera, dan berakhlakul karimah.

Di sisi kebijakan nasional, urgensi sertifikasi halal UMKM juga sejalan dengan dua poin Asta Cita Presiden RI, pertama Asta Cita nomor 5 yaitu meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dengan cara fasilitasi sertifikasi halal akan memperkuat produktivitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang merata. Kedua, Asta Cita nomor 6 yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara sertifikasi halal turut mendorong praktik produksi yang berkelanjutan, aman, dan ramah lingkungan, terutama dalam sektor pangan dan minuman.

Namun, data dalam skala nasional menunjukkan tingkat kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga November 2024 baru terdapat sekitar 1.547.271 pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, dengan total 5.575.021 produk bersertifikat halal. Angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total UMKM aktif di Indonesia yang mencapai puluhan juta unit.<sup>3</sup> Temuan peneliti sebelumnya mengemukakan sejumlah hambatan utama dalam proses sertifikasi halal meliputi biaya sertifikasi, keterbatasan literasi halal, dan birokrasi yang rumit.<sup>4</sup>

Selain itu, penelitian terdahulu banyak berfokus pada dampak sertifikasi halal terhadap perilaku konsumen atau daya saing produk<sup>5</sup>, tetapi belum banyak yang mengkaji kontribusinya secara langsung terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan pada level kota. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya terkait dengan aspek religius, melainkan juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip *sustainability*.<sup>6</sup>

Berdasarkan masalah diatas, dibutuhkan sebuah strategi kolaboratif yang dapat

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Tangerang, "Pemkot Tangerang Mulai Susun Rencana Aksi Daerah SDGs 2024–2026," <https://Tangerangkota.Go.Id/Berita/Detail/47771/Pemkot-Tangerang-Mulai-Susun-Rencana-Aksi-Daerah-Sdgs-2024-2026>, 2024.

<sup>2</sup> T Nurhayati and H Hendar, "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention: Role of Halal Product Awareness," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2020): 603–20, doi:10.1108/JIMA-11-2018-0220.

<sup>3</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal Untuk Lindungi UMK Dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri," <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Kepala-Bpjph-Sertifikasi-Halal-Untuk-Lindungi-Umk-Dari-Serbuan-Produk-Halal-Luar-Negeri>, 2024.

<sup>4</sup> K Anggraini et al., "Pendampingan Branding Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Muslim Di Desa Sukoraharjo Kepanjen Malang," *Ejournal UMM* 8, no. 1 (2024): 17–24, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>.

<sup>5</sup> G R Akbar and I K Rohman, "Analysis of the Impact of Halal Certificate on the Performance of Micro and Small Enterprises (SMEs) with the Propensity Score Matching (PSM) Method," *Journal of Strategic and Global Studies* 6, no. 1 (2023), doi:10.7454/jsgs.v6i1.1108.

<sup>6</sup> M S Ab Talib and M H Zulfakar, "Sustainable Halal Food Supply Chain Management in a Small Rentier Halal Market," *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 42, no. 3 (2024): 449–63, doi:10.1108/AGJSR-11-2022-0251.

mengintegrasikan pihak-pihak terkait. Pendekatan *Triple Helix* melibatkan pemerintah, universitas, dan industri dapat menjadi kerangka strategis dalam membangun ekosistem sertifikasi halal yang inovatif dan berkelanjutan.<sup>7</sup> Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam ekosistem sertifikasi halal pada UMKM di Kota Tangerang sebagai inovasi kolaboratif yang mendukung pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan praktik bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan interpretasi aktor kunci dalam proses sertifikasi halal UMKM. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, seperti kebijakan sertifikasi halal, yang sangat dipengaruhi oleh konteks, interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun oleh para pelaku.<sup>8</sup> Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan peran strategis dan relevansi langsung dengan fokus penelitian.<sup>9</sup> Penelitian ini melibatkan empat informan utama. Tiga informan berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkopukm) Kota Tangerang, yang berperan sebagai regulator dan fasilitator sertifikasi halal, yaitu Bapak Musokib selaku Ketua Tim Data Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro, Bapak Ady selaku Tim Pembangunan Sumber Daya Industri, dan Ibu Annisa selaku Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Industri. Satu informan lainnya adalah Ibu Desna, pelaku UMKM dan pemilik usaha makanan olahan Lasuko di Kota Tangerang, yang telah mengalami secara langsung proses serta tantangan dalam pengajuan sertifikasi halal. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman empiris yang relevan dan mampu memberikan informasi yang kaya terkait fokus penelitian. Jumlah informan yang terbatas ini dinilai memadai dalam penelitian kualitatif, selama informan tersebut merupakan aktor utama dan mampu memberikan data yang mendalam (*information-rich cases*).<sup>10</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan semi-terstruktur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, hambatan, serta harapan informan terhadap ekosistem sertifikasi halal berbasis *Triple Helix*. Wawancara mendalam dinilai efektif untuk memahami proses, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM maupun pemerintah dalam implementasi kebijakan.<sup>11</sup> Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang meliputi proses transkripsi data, reduksi data, pengkodean, serta penarikan tema-tema utama. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan sesuai untuk mengidentifikasi pola makna dalam data kualitatif.<sup>12</sup> Validitas data dijaga

---

<sup>7</sup> D Hariani, "Penerapan Model Triple Helix Bagi Pengembangan UMKM Halal Food Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2024): 1–14.

<sup>8</sup> John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

<sup>9</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (SAGE Publications, 2015).

<sup>10</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2016).

<sup>11</sup> Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*.

<sup>12</sup> Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in*

melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan perspektif pemerintah dan pelaku UMKM, serta mengaitkannya dengan dokumen kebijakan sertifikasi halal yang berlaku.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konsep *Triple Helix* dalam Inovasi

Model *Triple Helix* menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, universitas, dan industri dalam membangun ekosistem inovasi. Menemukan bahwa model *Triple Helix* diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan industri makanan halal UMKM, seperti kendala modal, sertifikasi halal, serta inovasi produk dan digitalisasi. Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan *Triple Helix* terbukti meningkatkan kinerja UMKM ketika aktor-aktor kunci menjalankan peran secara sinergis.<sup>14</sup>

### b. UMKM dan Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan UMKM. Penelitian meta analisis menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikasi halal secara signifikan mengalami peningkatan penjualan dan keberlanjutan usaha dibandingkan UMKM yang belum memiliki sertifikasi.<sup>15</sup> Namun, penelitian lain menemukan bahwa tingkat pemahaman dan literasi UMKM terkait prosedur sertifikasi halal masih rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal, tetapi terkendala oleh minimnya sosialisasi, biaya, dan kompleksitas regulasi.<sup>16</sup>

### c. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja UMKM

Beberapa penelitian menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dalam rantai pasok dan proses produksi UMKM. Sertifikasi halal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inovasi dan kinerja keuangan perusahaan di sektor makanan dan minuman di Indonesia.<sup>17</sup> Bahkan, kepemilikan sertifikasi halal terbukti meningkatkan pendapatan UMKM, terutama ketika didukung oleh literasi halal dan aksesibilitas informasi yang baik.<sup>18</sup>

### d. Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

---

*Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

<sup>13</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014).

<sup>14</sup> Sunday Noya, Stefanus Y M Taneo, and Melany Melany, "Triple Helix Innovation Ecosystem: The Role of Small and Medium Enterprises Community in Enhancing Performance," *Quality Innovation Prosperity* 27, no. 1 (2023): 46–61.

<sup>15</sup> R Bahara et al., "Sustainable Improvement of Food SMEs Through Halal Certification: A Meta-Analysis," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2957, 2024, doi:10.1063/5.0183887.

<sup>16</sup> Hirawati Oemar et al., "Awareness and Intention to Register Halal Certification of Micro and Small-Scale Food Enterprises," *F1000Research* 11 (2023): 170.

<sup>17</sup> Dekar Urumsah and Dyah Ayu Puspitasari, "Influence of Halal Certification on Innovation and Financial Performance," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 3 (2021): 650–66.

<sup>18</sup> Eri Novari et al., "The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia," *Indonesian Journal of Economics and Management* 4, no. 3 (2024): 444–59.

Transformasi regulasi melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan perubahan terbaru pada tahun 2023 mempercepat proses sertifikasi, mempermanenkan masa berlaku sertifikat, dan memperluas akses pendanaan untuk UMKM. Hal ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal global.<sup>19</sup>

### **Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Desna menekankan bahwa sertifikasi halal sangat penting karena mampu memberikan jaminan kehalalan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.<sup>20</sup> Dampaknya terlihat nyata dalam peningkatan penjualan dan kemudahan produk diterima oleh masyarakat, khususnya konsumen Muslim. Dalam proses pengajuan sertifikasi, beliau menghadapi hambatan berupa kesulitan administrasi terkait analisis bahan makanan yang diajukan. Meski demikian, adanya program pendampingan dari pemerintah daerah khususnya Disperindagkopukm Kota Tangerang dan asosiasi UMKM sangat membantu meringankan beban tersebut.

Setelah tersertifikasi halal, produk Lasuko mengalami lonjakan permintaan. Hal ini mendorong perluasan kapasitas produksi dan perekrutan tenaga kerja baru. Selain memberikan dampak ekonomi, praktik halal juga mendorong penerapan prinsip bisnis berkelanjutan, seperti menjaga kebersihan, efisiensi energi, penggunaan bahan baku lokal, dan pengelolaan limbah ramah lingkungan.

Lebih jauh, Ibu Desna menilai sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena membuka lapangan kerja baru dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa kendala utama bagi pelaku UMKM lain terletak pada keterbatasan informasi, dan rendahnya literasi halal. Oleh karena itu, ia berharap adanya edukasi dan pelatihan intensif dari pihak universitas selaku akademisi sebagai jembatan untuk berkolaborasi melakukan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah.

### **Hasil Wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang (Disperindagkopukm)**

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kota Tangerang dilakukan melalui program fasilitasi dan pendampingan yang disinergikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui LPPOM MUI Banten. Pemerintah kota Tangerang berperan dalam pendataan UMKM potensial, memberikan sosialisasi regulasi halal, dan membantu proses administrasi terutama bagi industri kecil menengah. Peserta program diwajibkan merupakan warga Kota Tangerang, yang dibuktikan dengan KTP, domisili, dan lokasi usaha. Alur pendaftaran sertifikasi halal meliputi empat tahap: pertama, pendaftaran melalui tautan resmi yang disediakan oleh Disperindagkopukm Kota Tangerang; kedua, mengikuti sosialisasi dan pembekalan bagi pelaku usaha terpilih; ketiga, pelaksanaan audit halal oleh LPPOM MUI Banten; dan keempat, penerbitan sertifikat halal

---

<sup>19</sup> Bahrina Almas, Sjafruddin Sjafruddin, and Hamzah Zainuri, "Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis," in *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, vol. 4, 2024, 40.

<sup>20</sup> Desna, Pelaku UMKM dan pemilik usaha makanan olahan *Lasuko*, wawancara, Kota Tangerang, 18 September 2025.

oleh BPJPH. Menurut Bapak Ady pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran untuk biaya sertifikasi halal.<sup>21</sup> Program sertifikasi halal gratis dilaksanakan sebanyak dua angkatan setiap tahun. Pada tahun 2025, setiap angkatan diikuti oleh 25 pelaku usaha. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 pelaku usaha per angkatan, seiring adanya kebijakan efisiensi.

Menurut Bapak Musokib, sertifikasi halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen hal ini mendorong pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal untuk mengurus sertifikasi halal. UMKM yang mempunyai sertifikasi halal memiliki kesempatan lebih besar untuk promosi produk.<sup>22</sup> Namun, dampak ini belum merata karena masih banyak UMKM yang belum sadar mengenai sertifikasi halal karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Ia juga menjelaskan bahwa UMKM yang sudah bersertifikat halal menunjukkan peningkatan omzet dan daya saing dibanding UMKM yang belum bersertifikasi, meskipun demikian dari segi data Disperindagkopukm belum melakukan pencatatan atau evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal terkait perkembangan pelaku usaha, menurut Annisa, bidangnya hanya memfasiliasi pelaku usaha sampai mendapatkan sertifikasi halal saja.<sup>23</sup>

Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi seperti pertumbuhan usaha & penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mendorong praktik produksi yang lebih aman, higienis, dan ramah lingkungan. Menurut Bapak Musokib dengan sertifikasi halal, UMKM terdorong menerapkan standar produksi yang baik, sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas. Hal ini berkontribusi terhadap SDG 8 (pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Secara sosial, keberadaan UMKM halal dengan pertumbuhan usahanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja.<sup>24</sup>

Tantangan utama pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Tangerang mencakup biaya sertifikasi, keterbatasan literasi halal di kalangan UMKM, selain itu, koordinasi antar-lembaga terkait sertifikasi halal (BPJPH, LPPOM MUI Banten, Pemerintah Kota) perlu diperkuat. Sebagai strategi, pemerintah kota mendorong pendekatan *Triple Helix*: Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, pemberian fasilitas, serta biaya sertifikasi halal. Akademisi melakukan penelitian, pelatihan atau edukasi, dan pendampingan untuk mentransfer pengetahuan tentang manajemen halal & praktik berkelanjutan. Pelaku usaha menggunakan sertifikasi halal sebagai bagian dari *branding* untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus mengedukasi pasar tentang pentingnya halal dan keberlanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan ekosistem halal di Kota Tangerang dapat tumbuh secara inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

## Implementasi Strategi *Triple Helix* dalam Inovasi Ekosistem Sertifikasi Halal UMKM di Kota Tangerang

---

<sup>21</sup> Ady, Tim Pembangunan Sumber Daya Industri, *wawancara*, Kota Tangerang, 19 September 2025.

<sup>22</sup> Musokib, Ketua Tim Data Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro, *wawancara*, Kota Tangerang, 19 September 2025.

<sup>23</sup> Annisa selaku Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Industri, *wawancara*, Kota Tangerang, 19 September 2025.

<sup>24</sup> Musokib, *wawancara*, Kota Tangerang, 19 September 2025.

### **1. Sintesis Temuan Lapangan**

Hasil wawancara menunjukkan konvergensi persepsi antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah mengenai nilai strategis sertifikasi halal. Dari sisi pelaku (Ibu Desna/Lasuko), sertifikasi halal dipandang sebagai jaminan kehalalan sekaligus instrumen peningkatan kepercayaan konsumen, yang tercermin dalam kenaikan permintaan, perluasan kapasitas produksi, dan penambahan tenaga kerja. Pandangan ini sejalan dengan pihak Disperindagkopukm yang menilai sertifikasi halal mendorong promosi dan daya saing UMKM meskipun dampaknya belum merata karena rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha kecil.

Pada level implementasi, kedua informan juga beririsan bahwa proses sertifikasi memiliki titik tantangan: bagi pelaku usaha, hambatan menonjol berada pada administrasi teknis, misalnya penelusuran/ analisis bahan, sedangkan pemerintah menekankan keterbatasan literasi dan minimnya kesadaran sebagai penyebab utama rendahnya partisipasi. Di sisi lain, dukungan pemerintah berupa fasilitasi dan pendampingan tersinergi dengan BPJPH melalui LPPOM MUI Banten diakui pelaku UMKM sebagai pereda beban yang nyata.

### **2. Pola Implementasi Program dan Kecukupan Layanan**

Skema pemerintah kota memfasilitasi sertifikasi halal melalui dua gelombang per tahun. Tahun 2025, kuota tersedia untuk satu angkatan sebanyak 25 pelaku usaha, menurun dari 30 pada tahun sebelumnya karena efisiensi anggaran. Alur yang disampaikan yaitu dimulai dari pendaftaran via tautan dinas, dilanjutkan sosialisasi & pembekalan dilanjutkan audit LPPOM MUI Banten hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH telah memberikan jalur yang jelas bagi UMKM. Namun, persyaratan domisili yang harus sepenuhnya Kota Tangerang (KTP, domisili, lokasi usaha) sekaligus kuota terbatas berpotensi membuat sebagian pelaku belum terjangkau.

Disperindagkopukm menegaskan bahwa fokus layanan berhenti pada penerbitan sertifikat; pemantauan pasca-sertifikasi seperti kinerja usaha/*omzet*/tenaga kerja belum dilakukan secara sistematis. Celah ini penting, karena tanpa evaluasi longitudinal pemerintah sulit mengukur efektivitas program dan menyesuaikan desain intervensi berbasis bukti.

### **3. Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan**

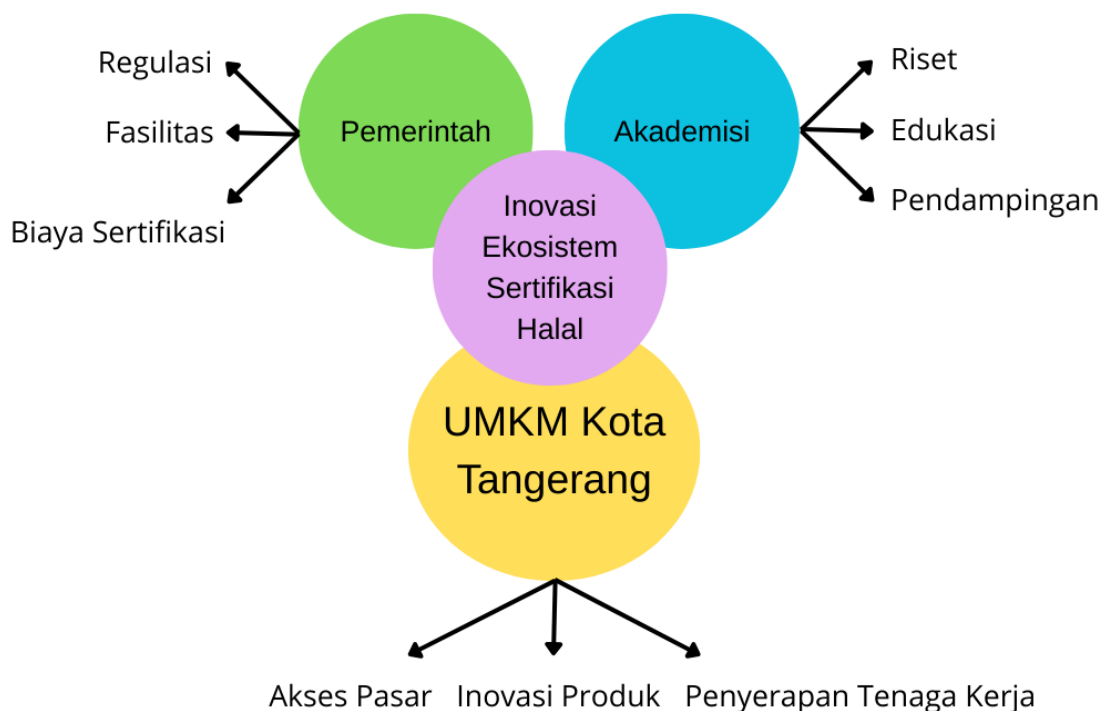
Pada tataran praktik, sertifikasi halal memicu perbaikan standar produksi (*higiene*, keamanan pangan) sekaligus praktik ramah lingkungan (efisiensi energi, penggunaan bahan baku lokal, pengelolaan limbah). Bagi Lasuko, konsekuensi bisnisnya konkret: permintaan meningkat mengakibatkan kapasitas naik sehingga merekrut tenaga kerja baru. Efek berantai ini mendukung SDG 8 (pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan SDG 12 (konsumsi & produksi bertanggung jawab). Secara sosial, rasa aman konsumen meningkat, sedangkan secara ekonomi daya saing ikut terdongkrak melalui akses promosi yang lebih luas.

### **4. Hambatan dan Akar Masalah**

Dua gugus hambatan tampak konsisten. Pertama, hambatan kapasitas pelaku: keterbatasan literasi halal, pemahaman dokumen, dan kesiapan menelusuri bahan. Kedua, hambatan sistemik: kuota terbatas, efisiensi anggaran yang menurunkan cakupan, dan kurangnya integrasi data lintas lembaga (BPJPH, LPPOM MUI Banten, Pemerintah Kota), terutama untuk pelacakan dampak. Dari sisi pelaku, literasi yang rendah membuat tahapan administratif terasa rumit dari sisi pemerintah, edukasi masif dan pendampingan teknis perlu ditingkatkan agar *drop-off* di setiap tahapan bisa ditekan. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang lebih erat diperlukan agar alur layanan lebih sederhana dan waktu tunggu lebih efisien.

### 5. Kerangka *Triple Helix* sebagai Inovasi Ekosistem Sertifikasi Halal

Hasil kedua wawancara diatas membuka peluang penguatan melalui pendekatan *Triple Helix*. Dari sisi pemerintah diharapkan dapat memperkuat fasilitas berupa biaya sertifikasi halal dan kuota adaptif, sosialisasi tersegmentasi berbasis subsektor Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI), serta sistem *monitoring & evaluation* (Monev) pasca sertifikasi. Dari sisi akademisi/universitas diharapkan dapat memberikan edukasi berkala dan pelatihan intensif berupa literasi pentingnya dan transfer pengetahuan praktik bisnis berkelanjutan. Sementara itu dari industri/pelaku UMKM: berbagi praktik terbaik (*best practices*) sesama pelaku UMKM, meningkatkan inovasi sehingga menghasilkan daya saing agar dapat melakukan ekspansi lebih luas. Sinergi ini diharapkan mengatasi hambatan literasi, memperluas jangkauan program, dan menghadirkan siklus umpan balik data untuk kebijakan berbasis bukti. Strategi *Triple Helix* ini dapat dilihat lebih jelas melalui ilustrasi gambar berikut:



### **Gambar 1. Strategi *Triple Helix* dalam Inovasi Ekosistem Sertifikasi Halal UMKM Kota Tangerang**

Gambar di atas menampilkan Strategi *Triple Helix* dalam Inovasi Ekosistem Sertifikasi Halal UMKM di Kota Tangerang. Diagram ini terdiri dari tiga aktor utama pemerintah, akademisi, dan UMKM yang saling berkontribusi untuk memperkuat ekosistem halal:

a) Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama melalui penyusunan regulasi, pemberian fasilitas, serta biaya sertifikasi halal. Peran ini penting agar UMKM tidak terbebani oleh biaya dan prosedur administratif yang rumit. Dengan adanya dukungan regulatif dan finansial, proses sertifikasi menjadi lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.

b) Akademisi

Akademisi, terutama perguruan tinggi dan lembaga penelitian *halal centre*, mengambil bagian dalam riset, edukasi, dan pendampingan. Melalui penelitian, akademisi dapat menghasilkan inovasi dalam praktik halal, sementara edukasi dan pendampingan membantu meningkatkan literasi akan pentingnya membangun *halal awareness* di kalangan UMKM maupun konsumen. Peran ini menjadi jembatan pengetahuan antara regulasi pemerintah dan praktik usaha.

c) UMKM KotaTangerang

UMKM sebagai pelaku utama di lapangan bertanggung jawab mengimplementasikan sertifikasi halal. Mereka berperan dalam inovasi produk, memperluas akses pasar, dan memanfaatkan teknologi untuk menjaga keberlanjutan usaha sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja secara masif. Dengan sertifikasi halal, UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar baik di level lokal, nasional, maupun internasional.

d) Sinergi *Triple Helix*

Titik temu dari tiga aktor tersebut adalah ekosistem sertifikasi halal. Sinergi ini menciptakan inovasi yang tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga menjamin kehalalan, kualitas, serta keberlanjutan produk. Strategi *Triple Helix* ini mendukung pencapaian SDG 8 (pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan SDG 12 (konsumsi & produksi yang bertanggung jawab), menjadikan Kota Tangerang lebih siap menjadi bagian dari pusat industri halal nasional.

## **6. Implikasi Kebijakan**

Implementasi strategi *triple helix* kedepannya akan berimplikasi pada berbagai kebijakan, diantaranya yang pertama perluasan cakupan & keberlanjutan program: menimbang kembali kuota dan mendorong skema pembiayaan campuran (APBD, CSR, mitra industri). Kedua, evaluasi pasca sertifikasi: membangun dashboard kinerja (omzet, tenaga kerja, cakupan pasar, kepatuhan) untuk menilai *return on* program dan menyasar dukungan lanjutan. Ketiga, standardisasi pendampingan teknis: modul "literasi halal praktis" (penelusuran bahan, dokumentasi, alur audit) dan *helpdesk* terintegrasi lintas lembaga. Terakhir, integrasi keberlanjutan: mengaitkan sertifikasi dengan insentif adopsi praktik hijau (efisiensi energi, pengurangan limbah), agar manfaat halal selaras dengan

target SDG 8 & SDG 12.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Sertifikasi halal memiliki dampak signifikan bagi UMKM. Temuan dari wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong lonjakan penjualan, memperluas kapasitas produksi, serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Tangerang melalui Disperindagkopukm telah berperan aktif dalam fasilitasi sertifikasi halal. Bentuk peran tersebut mencakup pendataan UMKM potensial, sosialisasi regulasi, fasilitas pembinaan hingga penyelenggaraan program sertifikasi halal gratis bekerja sama dengan BPJPH dan LPPOM MUI Banten. Meskipun demikian, keterbatasan kuota dan efisiensi anggaran menyebabkan cakupan program masih terbatas. Kendala utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal meliputi literasi halal yang rendah, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan koordinasi antarlembaga. Faktor-faktor ini menjadi penghalang bagi sebagian besar UMKM untuk mengakses sertifikasi halal secara optimal.

Pendekatan *Triple Helix* terbukti relevan untuk memperkuat ekosistem halal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator regulasi dan pembiayaan, akademisi sebagai penyedia riset, pelatihan, serta transfer pengetahuan, sementara UMKM sebagai pelaku utama dalam implementasi halal dan penguatan daya saing. Kolaborasi ini menjadi kunci terciptanya ekosistem halal yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan sejalan dengan tujuan SDG 8 dan SDG 12.

### b. Saran

Bagi Pemerintah Kota: perlunya meningkatkan alokasi anggaran dan memperluas kuota sertifikasi halal agar lebih banyak UMKM dapat difasilitasi, membentuk sistem evaluasi pasca sertifikasi untuk memantau perkembangan omzet, kapasitas produksi, dan dampak sosial dari UMKM yang telah bersertifikat, memperkuat koordinasi antarlembaga (BPJPH, LPPOM MUI, akademisi, dan asosiasi UMKM) guna menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses sertifikasi.

Bagi Akademisi/Universitas: melakukan riset terapan mengenai manajemen halal, rantai pasok berkelanjutan, dan inovasi produk untuk mendukung UMKM. Mengembangkan program pelatihan literasi halal praktis serta klinik pendampingan administrasi agar hambatan teknis UMKM dapat diminimalisir.

Bagi UMKM/Pelaku Usaha: meningkatkan kesadaran dan literasi halal melalui keikutsertaan aktif dalam sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun akademisi, menjadikan sertifikasi halal bukan hanya kewajiban legal, tetapi strategi branding dan diferensiasi produk untuk memperluas pasar, termasuk pasar nasional dan internasional.

Bagi Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas jumlah informan dengan melibatkan berbagai subsektor UMKM, asosiasi usaha, dan lembaga pendukung agar diperoleh gambaran lebih komprehensif, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed*

*methods* untuk mengukur dampak sertifikasi halal secara lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M S, and M H Zulfakar. "Sustainable Halal Food Supply Chain Management in a Small Rentier Halal Market." *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 42, no. 3 (2024): 449–63. doi:10.1108/AGJSR-11-2022-0251.
- Akbar, G R, and I K Rohman. "Analysis of the Impact of Halal Certificate on the Performance of Micro and Small Enterprises (SMEs) with the Propensity Score Matching (PSM) Method." *Journal of Strategic and Global Studies* 6, no. 1 (2023). doi:10.7454/jsgs.v6i1.1108.
- Almas, Bahrina, Sjafruddin Sjafruddin, and Hamzah Zainuri. "Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis." In *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 4:40, 2024.
- Anggraini, K, D R Widiyanti, N Shofiatin, and S Nanda. "Pendampingan Branding Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Muslim Di Desa Sukoraharjo Kepanjen Malang." *Ejournal UMM* 8, no. 1 (2024): 17–24. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal Untuk Lindungi UMK Dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri." <https://bpjph.halal.go.id/Detail/Kepala-Bpjph-Sertifikasi-Halal-Untuk-Lindungi-Umk-Dari-Serbuan-Produk-Halal-Luar-Negeri>, 2024.
- Bahara, R, M N Aidi, K Syamsu, E Sunarti, and A Jayanegara. "Sustainable Improvement of Food SMEs Through Halal Certification: A Meta-Analysis." In *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2957, 2024. doi:10.1063/5.0183887.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2016.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2018.
- Hariani, D. "Penerapan Model Triple Helix Bagi Pengembangan UMKM Halal Food Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2024): 1–14.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- Novari, Eri, Vemy Suci Asih, Elsa Yulandri, Iman Supratman, and Dudang Gojali. "The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia." *Indonesian Journal of Economics and Management* 4, no. 3 (2024): 444–59.
- Noya, Sunday, Stefanus Y M Taneo, and Melany Melany. "Triple Helix Innovation Ecosystem: The Role of Small and Medium Enterprises Community in Enhancing Performance." *Quality Innovation Prosperity* 27, no. 1 (2023): 46–61.
- Nurhayati, T, and H Hendar. "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention: Role of Halal Product Awareness." *Journal of Islamic*

*Marketing* 11, no. 3 (2020): 603–20. doi:10.1108/JIMA-11-2018-0220.

Oemar, Hirawati, Endang Prasetyaningsih, Siti Zakiah Abu Bakar, Djamaludin Djamaludin, and Anis Septiani. "Awareness and Intention to Register Halal Certification of Micro and Small-Scale Food Enterprises." *F1000Research* 11 (2023): 170.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. SAGE Publications, 2015.

Pemerintah Kota Tangerang. "Pemkot Tangerang Mulai Susun Rencana Aksi Daerah SDGs 2024–2026." <https://Tangerangkota.Go.Id/Berita/Detail/47771/Pemkot-Tangerang-Mulai-Susun-Rencana-Aksi-Daerah-Sdgs-2024-2026>, 2024.

Urumsah, Dekar, and Dyah Ayu Puspitasari. "Influence of Halal Certification on Innovation and Financial Performance." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 3 (2021): 650–66.